

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Dinamika pembangunan di bidang sosial, budaya dan ekonomi serta kemajuan teknologi informasi di era globalisasi selain membawa dampak positif ternyata juga dapat menimbulkan fenomena sosial baru seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual dan perdagangan orang dan paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Menindak lanjuti fenomena tersebut maka dalam Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu programnya adalah pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁶⁵

Peraturan pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai Norma, Standar, Prosedur, Kreteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan

⁶⁵ Brosur P2TP2A Provinsi Riau

